

## **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur)**

*Oktavia Lepa<sup>1</sup>*  
*Sofie pangemanan<sup>2</sup>*  
*Ismail Rachman<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang merupakan unit terdepan setelah desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat ditingkat kecamatan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan pertanian. Berbagai peran strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi ataupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan negara berkembang secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan kearah modernisasi guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan, Pertanian.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Peran pemerintah daerah sangat menentukan kebijakan pembangunan ekonominya. Kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaan di dalam menggalang berbagai pelaku, serta keseriusan dan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunannya. Pemerintah daerah dalam upaya memantapkan otonomi daerah dan persiapan menghadapi tantangan ke depan serta mengupayakan pengelolaan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung yang dimiliki.

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan,

strategi ataupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan negara berkembang secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan kearah modernisasi guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan baru tentang paradigma pembangunan tersebut menitik beratkan pada strategi pembangunan dari bawah ke atas dengan didasarkan pada mobilisasi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk wilayah itu. Strategi ini harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi tinggi untuk itu perlu campur tangan pemerintah melalui berbagai macam usaha/kegiatan.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah di pedesaan, merupakan suatu upaya pemerintah dalam menempatkan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kecil. Karena itu program pembangunan disentra pengembangan agribisnis pada hakekatnya adalah kegiatan awal untuk memacu pembangunan ekonomi pertanian pasca otonomi di pedesaan.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat”. Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga tidak terpisahkan pada diri manusia. Pada hakekatnya manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Adapun peran menurut Abdulsyani, (2012 : 94) Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya dia menambahkan bahwa Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. Menurut Inu Kencana Syaffie (2011:61) secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata ”perintah” yang kemudian mendapat imbuhan ”pe” menjadi kata ”pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan

pekerjaan mengurus suatu negara. Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat,
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya,
- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah, serta
- d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Pemerintah juga merupakan satu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan proses kegiatannya disebut pemerintahan dan besar kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, dengan demikian pemerintah dalam menjalankan proses kegiatan Negara harus berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu negara.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Siagian (2008:45) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". Sedangkan Ginanjar Moejiarto (2007:32) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana". Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Negeri Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita. Sejalan dengan peningkatan peradaban manusia, pertanianpun berkembang menjadi berbagai sistem. Mulai dari sistem yang paling sederhana sampai sistem yang canggih dan padat modal. Berbagai teknologi pertanian dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2016:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow

dalam pembangunan pertanian di kecamatan passu timur, dilihat dari teori pembangunan pertanian yang dikemukakan oleh Darsono dengan melihat beberapa aspek antara lain :

1. Kebijakan Sektor Pertanian
2. Subsidi Pertanian
3. Infrastruktur Sektor Pertanian

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi obyek lokasi penelitian. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Peneliti sebagai informan kunci,
2. Pegawai kecamatan 2 orang,
3. Penyuluh pertanian 2 orang, dan
4. Masyarakat (Petani) 4 orang

## Hasil Penelitian

Sejak awal tahun 1970, paradigma pembangunan pertanian di Indonesia berubah drastis seiring perubahan paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat itu, sektor pembangunan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi dijadikan buffer (penyangga) guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya formulasi kebijakan didasarkan pada berbagai pertimbangan baik politik, sosial-ekonomi, institusi, lingkungan, sumber daya, tingkat kelayakan, di samping faktor-faktor teknis. Sebagaimana telah dipahami bersama, pembangunan pertanian memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya bagi negara-negara berkembang, bagi negara maju pun pertanian tetap mendapat perhatian dan perlindungan yang sangat serius. Merumuskan kebijakan pertanian

memang tidak mudah. Posisi di persimpangan banyak kepentingan, baik ekonomi maupun politik, membuat kebijakan pertanian kerap kali sulit melepaskan diri dari berbagai kontroversi. Kentalnya warna politik dalam berbagai kebijakan tampaknya menyulitkan perbaikan sektor potensial perekonomian Indonesia ini.

Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bahwa pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pembangunan dan masyarakat secara umum.

Secara luas pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Usaha pokok pembangunan pertanian secara terus menerus ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Intensifikasi adalah upaya

peningkatan produktivitas sumber daya alam seperti peningkatan penggunaan lahan kering, perairan dan area pasang surut serta pemanfaatan sarana produksi, pestisida, pupuk, air dan lain-lain. Mengenai hal tersebut berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah kecamatan dalam pembangunan pertanian di kecamatan passi timur saat ini kebijakan yang ambil oleh pemerintah kecamatan berlandaskan oleh program-program dari pemerintah pusat baik itu dari pemerintah daerah maupun dari dinas terkait dalam hal ini dinas pertanian, dimana pemerintah kecamatan passi timur sebatas menjadi penghubung bagi pemerintah daerah (Dinas pertanian) selanjutnya disampaikan kepada pemerintah desa untuk di informasikan kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya, dimana berdasarkan informasi yang di dapat dari hasil wawancara pemerintah desa juga diberikan kewenangan atau kebijakan untuk memberikan bantuan-bantuan bagi para petani lewat dana desa baik itu permodalan lewat koperasi desa maupun lewat Bumdes, dan ini tentunya untuk kepentingan bersama khususnya bagi masyarakat petani.

Subsidi adalah bagian harga suatu barang atau jasa yang ditanggung oleh pemerintah dari harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat pengguna barang atau jasa tersebut. Untuk subsidi pertanian, ada dua jenis masyarakat pengguna, yaitu masyarakat produsen hasil pertanian, dan masyarakat konsumen hasil pertanian. Bagi masyarakat produsen hasil pertanian, subsidi diberikan untuk harga sarana produksi, misalnya pupuk dan benih. Sementara bagi masyarakat konsumen hasil pertanian, subsidi diberikan untuk harga pangan pokok, khususnya beras. Masing-masing jenis subsidi,

sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai tujuan. Subsidi harga sarana produksi bagi masyarakat produsen hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan daya beli petani yang kurang mampu agar dapat membeli sarana produksi dalam jumlah yang cukup untuk meningkatkan atau mempertahankan produktivitas dan pendapatan usahataniannya. Dengan harga sarana produksi yang lebih murah, masyarakat produsen pertanian juga didorong untuk menerapkan teknologi yang lebih maju sehingga produktivitasnya meningkat. Sementara subsidi harga pangan pokok (beras) bagi masyarakat konsumen hasil pertanian bertujuan untuk meringankan beban hidup sekaligus mencukupi kebutuhan pangan pokok (beras) minimum dalam rangka penguatan ketahanan pangan masyarakat miskin.

Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu perluasan areal tanam atau areal panen dan peningkatan produktivitas per satuan luas areal. Peningkatan produktivitas dapat dicapai antara lain melalui penggunaan benih unggul bermutu dan pemupukan berimbang dalam jumlah yang memadai. Namun karena sebagian besar produsen pertanian di Indonesia adalah petani berskala kecil yang modalnya terbatas, Pemerintah terdorong untuk memberikan subsidi pupuk agar petani mempunyai kemampuan dan aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap input produksi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan subsidi diarahkan untuk mencapai Tujuan Antara dan Tujuan Akhir. Yang

dimaksudkan dengan Tujuan Antara adalah meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi. Sementara Tujuan Akhir adalah meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Proses penyaluran baik itu pupuk bersubsidi diawali dengan usulan dari kelompok tani. Kelompok tani membuat usulan kebutuhan pupuk para petani anggotanya yang dituangkan dalam RDKK (Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok). RDKK tersebut dikirimkan kepada Penyalur (Kios) atau Gapoktan yang bertindak sebagai pengecer resmi (Lini-IV), dan selanjutnya rekapitulasi usulan kebutuhan pupuk tersebut dikirimkan kepada Distributor (Lini-III). Rekapitulasi kebutuhan pupuk yang telah disusun oleh distributor kemudian dikirimkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan selanjutnya secara berjenjang diserahkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hal tersebut mengenai peran pemerintah daerah khususnya di kecamatan passi timur dalam subsidi pertanian di wilayahnya, pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa juga dengan kelompok tani yang ada di desa-desa untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan petani yang ada di kecamatan passi timur, selanjutnya pemerintah kecamatan juga menjadi penghubung untuk dinas terkait dalam hal ini dinas pertanian dan pemerintah desa dalam penyampaian informasi dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat petani yang ada di wilayah kecamatan passi timur.

Infrastruktur pertanian adalah merupakan suatu bangunan fisik (struktur) pendukung pengembangan pertanian. Sarana pendukung tersebut berupa bangunan penyedia air irigasi (dam, sumur pompa), saluran irigasi dan drainase serta jalan pertanian. Saat ini di wilayah kecamatan passi timur mengenai infrastruktur pertanian telah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat petani memalui dinas pertanian dengan mengadakan bantuan pompa air trektor dll. Pemerintah sendiri secara berkesinambungan terus membangun infrastruktur pertanian, dari waduk, embung, sampai dengan irigasi sekunder dan tersier. Tujuannya adalah agar selalu tersedia suplai air yang mencukupi untuk lancarnya proses pertanian. Untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera, insfrastruktur adalah poin utama yang harus menjadi perhatian suatu bangsa.Indonesia kini tengah berbenah dalam memperbaiki insfrastruktur, termasuk juga infrastruktur pertanian. Sejak menjadi pemimpin No 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo terus berupaya menggalakkan pembangunan infrastruktur pertanian. Suatu hal yang patut diapresiasi, mengingat potensi Indonesia dalam mengekspor hasil pertanian yang besar, apabila pertanian diolah dengan benar dan didukung oleh pemerintah. Terhitung sejak memegang jabatan sebagai presiden, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk membangun bendungan yang menyebar di seluruh tanah air. Membuat dan memperbaiki berbagai saluran irigasi pun menjadi fokus dalam menciptakan kemandirian pangan. Untuk menjaga produksi pangan, harus ada normalisasi berbagai sarana infrastruktur di berbagai macam daerah. Waduk-waduk harus dimanfaatkan, serta saluran irigasi perlu

diciptakan dan dijaga, agar menjadi infrastruktur pertanian yang tepat guna. Waduk-waduk ini akan sangat memudahkan petani dalam proses pengairan sawah dan lahannya. Apabila biasanya sawah hanya ditanami ketika musim hujan, maka sawah juga bisa terus dimanfaatkan meskipun musim kemarau tiba. Agar semakin berfungsi maksimal dan berumur panjang, diharapkan infrastruktur pertanian ini dapat dilakukan upaya tata kelola yang maksimal. Seperti irigasi, akan ada pembagian kewenangan dalam mengelola kewenangan. Tak hanya dari pusat, proses penguatan infrastruktur pertanian di Indonesia sendiri harus diturunkan juga ke pemerintah daerah hingga ke sektor desa. Dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertanian masyarakat saat ini terus dilakukan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah memprogramkan sejumlah kegiatan melalui Dinas Pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian sebenarnya harus diimbangi pula dengan membangun dan menciptakan infrastruktur pendukung, seperti misalnya pusat penelitian pertanian, pusat pembenihan, serta pembibitan. Apabila hal ini dilakukan, komoditas pertanian yang dikembangkan di masing-masing daerah bisa sesuai dengan struktur tanah dan alam yang tersedia. Dan Tak hanya infrastruktur, optimasi pertanian di Indonesia sebaiknya didukung pula dengan program saran penunjang. Beberapa di antaranya merupakan saran produksi seperti benih, pupuk, pestisida, serta obat tanaman yang dibutuhkan petani.

Kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian ini juga mencapai daerah perbatasan. Kementerian Pertanian (Kementan)

sendiri telah berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sektor pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Pentingnya fungsi infrastruktur pertanian dalam memaksimalkan potensi pertanian Indonesia semakin menegaskan seberapa pentingnya perbaikan dan pengadaan infrastruktur pertanian tersebut. mengenai hal tersebut saat ini sektor perekonomian merupakan satah satu dari tiga sector yang di unggulkan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan salah satu penopang perekonomian kabupaten bolaang mongondow juga maka dari itu untuk menyelaraskannya pemerintah perlu adanya kolaborasi antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Pemerintah membantu masyarakat dalam menyediakan pupuk serta berbagai alat dan kebutuhan yang akan di pakai oleh sector pertanian sedangkan swasta membantu pemerintah dalam mengadakan pupuk dan berbagai alat yang akan di pakai oleh sector pertanian, selain itu pemerintah juga harus membantu masyarakat dengan mengadakan penyuluhan, dimana penyuluhan juga diharapkan dapat mendorong pengetahuan masyarakat tentang pertanian dan teknologi pertaian khususnya bagi petani dalam menopang ketersediaan pangan nasional.

## Kesimpulan

1. Pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa juga dengan kelompok tani yang ada di desa-desa untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan petani yang ada di kecamatan passi timur, selanjutnya pemerintah kecamatan juga menjadi penghubung untuk dinas terkait dalam hal ini dinas pertanian dan pemerintah desa



dalam penyampaian informasi dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat petani yang ada di wilayah kecamatan passi timur.

2. Pemerintah kecamatan passi timur dalam pembangunan di bidang Pertanian berupa melakukan pembinaan, mengkoordinasikan kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap program kegiatan di wilayah kerjanya. Pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan, berupa pemberian bimbingan, arahan, informasi data, serta pendidikan dan pelatihan bersama-sama dengan penyuluh pertanian.
3. Peran pemerintah kecamatan passi timur dalam pembangunan pertanian di kecamatan passi timur adalah sebagai jembatan atau penghubung bagi pemerintah desa yang ada di desa-desa kecamatan passi timur dengan pemerintah daerah khususnya dinas pertanian untuk menyampaikan atau meneruskan kebutuhan-kebutuhan para petani yang ada untuk meningkatkan pertanian yang ada di kecamatan passi timur.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.  
Anonim. 2012. *Community Based Rehabilitation Program*. PRY Yogyakarta. Yogyakarta : Pusat Rehabilitasi YAKKUM Database.  
Argandi, Ganesya. 2012. *Struktur Komunitas Lamun di Perairan Pangerungan*. Bogor : Institut Pertanian.  
Duverger, Maurice, 2010. *Sosiologi Politik*, terjemahan Daniel Dhakidae, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

## Saran

1. Pemerintah kecamatan dan penyuluh pertanian lebih lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program pertanian yang ada, dan alangkah baiknya pemerintah khususnya di desa lebih mendorong masyarakat petani untuk ikut masuk dalam kelompok tani.
2. Pemerintah kecamatan lebih lagi berkoordinasi dengan dinas pertanian dan pemerintah desa untuk turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan para petani demi kesejahteraan para pelaku pertanian.
3. Untuk para petani lebih lagi mengikuti akan setiap program pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan disarankan untuk ikut masuk atau ambil bagian dalam kelompok tani di setiap masing-masing desa agar setiap informasi dan bantuan yang ada langsung diketahui dan langsung mendapatkan saluran bantuan yang telah diprogramkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Maran, Rafael Raga. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Asdi Mahasatya.  
Moejiarto Gianjar, 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.  
Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.  
Iqbal dan Sudaryanto. 2008. *Pembangunan Pertanian Indonesia*. <http://blogs.unpad.ac.id/abysanilaras/20>

10/06/13/pentingnya-  
pembangunanpertanian-di-indonesia/  
Wulansari, C. Dewi. 2009. Sosiologi:  
Konsep dan Teori. PT Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  
2018 tentang Kecamatan  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah

